

**Analisis Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Video YouTube Najwa Shihab
Berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan***

Renzy Rindiani Ibrahim

Pos-el: renzy2000025041@webmail.uad.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Intan Rawit Sapanti

Pos-el: intanrawit.sapanti@idlitera.uad.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Maxim Grice;
Prabowo and Najwa;
pragmatics;
talkshow;
violation of the principle of
cooperation.

The effectiveness of communication is influenced by the cooperative principles contained in it. Violations of the principle of cooperation will cause miscommunication. The aim of this research is to determine forms of violation of the principle of cooperation in Najwa Shihab's YouTube video entitled Prabowo Subianto Berbicara Gagasan. This type of research includes descriptive qualitative research. The data source for this research is Najwa Shihab's YouTube video entitled Prabowo Subianto Berbicara Gagasan. In the analysis process, researchers used Grice's theory of cooperative principle (1991). The methods and techniques of collecting data for this research use the listening method through note-taking techniques and free, skillful listening. Then, the researcher used data analysis methods and techniques in the form of Padan Pragmatik method with the Hubung Banding Menyamakan (HBS). The research results found that there were 8 speech data that violated the principle of cooperation, with details of 4 violations of the maxim of relevance, 1 maxim of quantity, and 3 maxims of manners.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata kunci

Maksim Grice;
pelanggaran prinsip kerja
sama;
Prabowo dan Najwa;
pragmatik;
talkshow.

Keefektifan komunikasi dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kerja sama yang ada di dalamnya. Pelanggaran-pelanggaran prinsip kerja sama akan menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kerja sama yang ada dalam video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*. Dalam proses analisisnya, peneliti menggunakan teori prinsip kerja sama Grice (1991). Metode dan teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode simak melalui teknik catat dan simak bebas libat cakap. Kemudian, peneliti menggunakan metode dan teknik analisis data berupa metode padan pragmatik dengan teknik Hubung Banding Menyamakan (HBS). Hasil penelitian menemukan ada 8 data tuturan yang melanggar prinsip kerja sama dengan rincian 4 pelanggaran maksim relevansi, 1 maksim kuantitas, dan 3 maksim cara.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, bahasa menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalin komunikasi antarsesama. Ini sejalan dengan pendapat Mailani et al. (2022:2) yang menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi, yakni berupa menyampaikan informasi, pendapat, dan argumentasi kepada pihak lain. Setiawan et al. (2017:2) juga menjelaskan jika komunikasi dan bahasa menjadi dua hal yang tidak dapat terpisah. Keduanya menjadi hal mutlak yang dibutuhkan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup sebagai makhluk sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya bahasa dalam kehidupan manusia menjadi faktor yang sangat penting karena dijadikan sarana berkomunikasi antarsesama.

Sejalan dengan itu, Nasution (2007:445) juga menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan nasional dan internasional suatu bangsa, bahasa diperlukan karena peranannya yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi kompleks, termasuk munculnya penyalahgunaan-penyalahgunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali dalam dunia politik. Dalam perkembangannya, bahasa tidak sekadar digunakan sebagai alat komunikasi dengan tujuan akhir menciptakan makna yang sama, tetapi justru bahasa dijadikan sebagai topeng, ideologi, bahkan bahan manipulasi (Nasution, 2007:445). Bahasa dengan fungsi semacam ini biasanya digunakan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Lebih lanjut, Nasution (2007:446) memberikan contoh apabila para penguasa melakukan kesalahan, maka tidak akan pernah berkata “saya salah”, tetapi justru akan mengatakan “maaf, saya khilaf”.

Proses komunikasi memerlukan kerja sama antara peserta tutur untuk mencapai keefektifan di dalamnya. Efendi et al. (2023:22) menjelaskan komunikasi yang efektif ditandai dengan kemampuan lawan tutur dalam memaknai pesan yang sama seperti yang dikatakan oleh penutur sehingga mampu meminimalisasi kesalahpahaman. Dalam menjalin komunikasi antara penutur dan lawan tutur, keduanya sadar jika terdapat kaidah yang mengatur tindakan, penggunaan bahasa, hingga interpretasi terhadap tindakan dan tuturan dari lawan tuturnya (Wijaya, 2019:78). Oleh karena itu, kedua peserta tutur harus membangun kerja sama dalam mengutarakan pendapatnya secara jelas (tidak ambigu) agar komunikasi yang berlangsung dapat berjalan dengan baik.

Wijana dan Rohwadi (2009:44) mengungkapkan bahwa ketika terjadi penyimpangan, penutur ingin mencapai implikasi-implikasi tertentu. Artinya, ketika terjadi pelanggaran prinsip kerja sama pada saat berkomunikasi, sebenarnya memiliki maksud dan tujuan tertentu dari penutur. Seperti misalnya, penutur memiliki keterbatasan pengetahuan atau informasi sehingga penutur memberikan informasi yang bertentangan dari yang diharapkan. Selain itu, alasan privasi dapat juga menjadi alasan penutur untuk tidak merespons atau menjawab pertanyaan lawan tuturnya. Implikasi ini berupa upaya dalam memperjelas informasi, ataupun mengalihkan pembicaraan.

Berkaitan dengan penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa agar terciptanya keefektifan dalam komunikasi, maka peserta tutur harus menerapkan prinsip kerja sama tersebut. Apabila melanggar prinsip ini, maka dapat terjadi miskomunikasi. Komunikasi terjalin ketika penutur

dan lawan tutur berdialog dengan maksud tertentu. Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila penutur mengetahui cara menyampaikan informasi dengan baik dan lawan bicara memahami pesan penutur. Untuk memahami pesan antara penutur dan lawan tutur, harus ada kerja sama yang baik di antara keduanya. Kerja sama itu dilandaskan pada pengetahuan, referensi, konteks, dan tujuan bersama bagi penutur dan lawan tutur.

Pada kehidupan sehari-hari, terdapat banyak pelanggaran prinsip kerja sama dari penutur maupun lawan tutur. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran prinsip kerja sama dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, misalnya pernyataan pada pertunjukan teater, film, kartun, bahkan video. Salah satu video yang mengandung pelanggaran-pelanggaran prinsip kerja sama, yaitu terdapat pada video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*. Video tersebut berisi terkait wawancara antara Najwa Shihab, selaku pembawa acara, dengan Prabowo Subianto, selaku narasumber. Peneliti melihat adanya tuturan-tuturan yang melanggar prinsip kerja sama dalam video tersebut, sehingga peneliti tertarik menganalisis pelanggaran prinsip kerja sama dengan tujuan mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran maksimal dalam video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*.

Penelitian terkait pelanggaran prinsip kerja sama ini sudah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti membatasi dalam 3 tahun terakhir. Dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan pada kurun waktu 3 tahun tersebut, didapat tiga penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini. Ketiga penelitian tersebut, yaitu Citra & Fatmawati (2021), Rahmawati (2021), dan Tarigan (2022). Walaupun banyak penelitian serupa, tetapi peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang menggunakan video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan* sebagai subjek penelitiannya.

Konteks bahasa politik biasanya menggunakan bahasa yang tidak langsung atau memiliki makna samar. Oleh karena itu, perlu pengkajian lebih mendalam untuk mengetahui makna tersebut. Pada penelitian ini, akan menganalisis makna yang sering disebut dengan implikatur. Grice dalam Arifin (2000:154) menjelaskan bahwa istilah implikatur diartikan sebagai makna yang tidak dimunculkan oleh dalam tuturan. Implikatur dapat digunakan ketika ingin mengatakan sesuatu secara tidak langsung. Pemaknaan implikatur berkaitan dengan konteks penggunaannya, sehingga pengetahuan dan kemampuan menganalisis konteks sangat berpengaruh dalam menentukan ketepatan menangkap implikatur. Implikatur terbagi menjadi dua, yaitu implikatur konvensional dan percakapan (Grice dalam Ariani et al., 2016:2). Implikatur konvensional merupakan implikasi pragmatik yang tidak muncul dari konteks prinsip kerja sama, tetapi muncul dari proses pemaknaan kata itu. Adapun implikatur percakapan justru dalam proses pemaknaannya sangat bergantung kepada konteks terjadinya tuturan tersebut.

Yule (2006:78) juga menjelaskan hal yang sama bahwa implikatur konvensional tidak harus muncul dalam sebuah percakapan dan tidak bergantung pada aturan prinsip kerja sama atau maksimal atau hal tertentu untuk menginterpretasikannya. Berbeda dengan implikatur konvensional, Yule (2006:78) melanjutkan bahwa implikatur percakapan didasarkan pada prinsip kerja sama atau maksimal-maksimal apabila peserta tutur menerapkannya.

Grice juga menawarkan prinsip kerja sama ketika melakukan suatu percakapan dalam teorinya yang tertuang dalam bukunya berjudul *Logic and Conversation* (1991). Ia mengatakan bahwa berikanlah kontribusi dalam percakapan secara secukupnya dan sesuai dari tujuan percakapan yang telah disepakati atau arah percakapan yang sedang diikuti. Kemudian, bersamaan dengan prinsip kerja sama ini, Grice (1991:45) melengkapi dalam teori keduanya, yaitu maksim percakapan. Terdapat empat maksim percakapan, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara.

- (1) Maksim kualitas mengharuskan peserta percakapan menyampaikan sesuatu yang benar-benar terjadi sesuai dengan fakta dan data.
- (2) Maksim kuantitas menuntut peserta percakapan mengatakan hal yang sesuai dengan kebutuhan informasi.
- (3) Maksim relevansi mengatur peserta percakapan agar memberikan informasi yang sejalan dengan topik pembahasan.
- (4) Maksim cara mengharuskan peserta percakapan berbicara langsung secara jelas, runtut, tidak ambigu, kabur, dan tidak berlebihan.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan analisis tuturan dalam video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Bicara Gagasan* karena tuturan yang disampaikan oleh Najwa Shihab dan Prabowo dalam video tersebut mengandung pelanggaran prinsip kerja sama.

METODE PENELITIAN

Secara analitis, ada dua jenis metode penelitian dalam menyelesaikan permasalahan penelitiannya, yaitu berupa penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif (Afrizal, 2016). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil analisis penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003:4). Adapun penelitian deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2010:6), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan subjek penelitian, misalnya motivasi, perilaku, persepsi, bahkan tindakan secara keseluruhan. Sapanti & Suswandi (2022:155) juga menjelaskan jika deskriptif berkaitan dengan proses analisis untuk mencapai suatu tujuan dengan cara pendeskripsian atau penggambaran data yang diperoleh.

Subjek penelitian terkait dengan sumber dari mana data itu dapat diperoleh (Arikunto, 2013:172). Sumber data penelitian ini merupakan video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*. Video ini diunggah pada 1 September 2023 dengan durasi 1 jam 24 menit 21 detik. Data penelitiannya berupa tuturan antara Najwa Shihab selaku pembawa acara dan Prabowo sebagai narasumber yang mengandung pelanggaran maksim dalam video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*.

Menurut Supriyati (2012:38), objek penelitian adalah variabel yang akan diteliti di lokasi penelitian. Oleh karena itu, variabel (masalah yang akan dipecahkan) harus ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, Husein (2013:18) juga berpendapat jika objek penelitian merupakan hal yang menunjukkan atau menjelaskan tentang apa atau siapa objek penelitiannya. Objek dalam penelitian ini berupa tuturan-tuturan yang mengandung

pelanggaran prinsip kerja sama dalam video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*.

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode simak melalui teknik catat dan simak bebas libat cakap. Sudaryanto (2015:204) menjelaskan dalam teknik pengumpulan data jenis ini, peneliti tidak ikut serta dalam dialog dari subjek penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti fokus menyimak atau mengamati tuturan dari penutur dan lawan tuturnya. Kemudian, peneliti juga menggunakan teknik catat dengan cara menonton video tersebut. Setelah proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan proses analisis data. Peneliti menggunakan metode analisis data padan pragmatik. Menurut Kesuma (2007:49), metode padan pragmatik merupakan metode yang alat penentunya adalah lawan tutur. Selain itu, peneliti menggunakan teknik dasar berupa teknik pilah unsur penentu (PUP). Peneliti memilih teknik ini untuk memilah data yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama dalam video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*.

Peneliti kemudian menggunakan teknik lanjutan berupa teknik Hubung Banding Menyamakan (HBS). Teknik ini berguna untuk menyamakan antara data dengan transkrip dialog dalam video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto Bicara Gagasan*. Tuturan yang disampaikan oleh Najwa Shihab dan Prabowo Subianto disamakan dengan fokus penelitian, yaitu tindak tutur yang menggambarkan bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kerja sama.

HASIL PEMBAHASAN

Peneliti telah melakukan proses penyimakan dan transkripsi pada subjek penelitian. Berdasarkan proses pengumpulan data yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya 8 data yang melanggar maksim kerja sama dengan rincian 4 pelanggaran maksim relevansi, 1 maksim kuantitas, dan 3 maksim cara. Berikut data dan juga penjelasan dari hasil analisisnya.

Data 1

Durasi	04.53–05.31
Data	Najwa: “Yang jelas Pak Prabowo bicara dengan banyak kelompok masyarakat, ke petani, ke nelayan, ke kyai dan lain sebagainya, apa bedanya kalo bicara dengan mahasiswa, Pak?” Prabowo: “Saya kira ya, mahasiswa yang paling berkepentingan karena masa depan milik mereka semua. Mereka yang berkepentingan liat bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang adil, itu kepentingan mereka, karena itu mereka sangat berkepentingan untuk mengikuti perkembangan.”
Konteks	Najwa, sebagai penutur, menganggap Prabowo telah bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang, sehingga ia menanyakan perbedaannya ketika bertemu dengan mahasiswa. Hal ini dikarenakan acara tersebut penontonnya didominasi oleh para mahasiswa.

Pada Data 1, tuturan yang disampaikan Prabowo mengandung pelanggaran maksim relevansi. Hal ini disebabkan karena Prabowo menyampaikan informasi yang bertele-tele yang tidak menjawab pertanyaan dari Najwa dan justru malah menyampaikan informasi lain.

Najwa bertanya dengan bunyi tuturan, *yang jelas Pak Prabowo bicara dengan banyak kelompok masyarakat, ke petani, ke nelayan, ke kyai dan lain sebagainya, apa bedanya kalo bicara dengan mahasiswa, Pak?*. Melalui tuturan itu, Najwa berharap Prabowo akan menjawab terkait pendapatnya tentang perbandingan antara berbicara dengan mahasiswa dan masyarakat dengan latar belakang lainnya. Namun, Prabowo justru melanggar maksim cara yang dapat dilihat dari jawabannya dengan bunyi, *saya kira ya, mahasiswa yang paling berkepentingan karena masa depan milik mereka semua. Mereka yang berkepentingan liat bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang adil, itu kepentingan mereka, karena itu mereka sangat berkepentingan untuk mengikuti perkembangan.*

Prabowo hanya fokus menjawab terkait mahasiswa, tanpa memberikan perbandingannya. Tidak ada satu pun ujaran Prabowo yang menjawab pertanyaan dari Najwa. Adapun maksud dari pelanggaran yang dilakukan Prabowo, yaitu ingin menjelaskan terkait pentingnya berbicara dengan mahasiswa karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa. Mahasiswa harus terlibat dan mengetahui kondisi perkembangan negaranya.

Data 2

Durasi	21.05–21.30
Data	Najwa: “Apa kira-kira tujuan, kalo pak Prabowo menebak-nebak, tujuannya, eee, membuat rumor seperti pak Prabowo emosional menampar bahkan mencekik di rapat kabinet disebutnya?” Prabowo: “Tapi saya dulu di, difitnah lebih gawat lagi itu, meng kudeta lah, meng ini, meng itu. Sedikit-sedikit memberontak, ga tau, muka saya muka-muka kudeta kali, ya.”
Konteks	Najwa mengonfirmasi kembali terkait rumor Prabowo mencekik wakil menteri pertanian dalam rapat kabinet. Ia menanyakan pendapat Prabowo terkait praduga tujuan dari orang atau oknum yang menciptakan rumor tersebut.

Tuturan yang disampaikan Prabowo pada Data 2 mengandung pelanggaran maksim relevansi. Hal ini disebabkan karena Prabowo menyampaikan jawaban yang tidak relevan atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan pertanyaan dari Najwa.

Najwa bertanya dengan bunyi tuturan, *apa kira-kira tujuan, kalo pak Prabowo menebak-nebak, tujuannya, eee, membuat rumor seperti pak Prabowo emosional menampar bahkan mencekik di rapat kabinet disebutnya?* Melalui tuturan itu, Najwa tentu berharap bahwa Prabowo akan menjawab terkait pendapatnya tentang tujuan terciptanya rumor tentang emosional Prabowo sampai mencekik wakil ketua menteri pertanian. Akan tetapi, Prabowo justru melanggar prinsip kerja sama relevansi yang dapat dilihat dari jawabannya dengan bunyi, *Tapi saya dulu di, difitnah lebih gawat lagi itu, meng kudeta lah, meng-ini, meng-itu. Sedikit-sedikit memberontak, ga tau, muka saya muka-muka kudeta kali, ya.*

Najwa menanyakan terkait pendapat tujuannya, tetapi Prabowo justru mencoba menceritakan pengalamannya yang dianggap lebih parah dari rumor yang ditanyakan tersebut. Adapun maksud dari pelanggaran yang dilakukan Prabowo, yaitu tidak mempermasalahkan rumor ini dan acuh dengan tujuan orang atau oknum yang membuatnya, karena sebelumnya sudah pernah mengalami hal yang lebih parah dari pada itu.

Data 3

Durasi	22.25–23.19
Data	Najwa: “Pak, jadi Pak Prabowo tidak akan menelusuri siapa yang menyebarkan rumor atau kemudian bahkan menempuh jalur hukum terkait itu atau bagaimana, Pak?” Prabowo: “Saya begini, dari dulu saya punya guru-guru yang menyatakan kepada saya, Prabowo, jika kau di fitnah, yakan, itu tandanya kau diperhitungkan, dan biasanya fitnah yang semakin kejam itu balik kepada orang yang menyebarkan fitnah, jadi saya ga pernah urus, saya serahkan pada yang di atas saja. Mudah-mudahan yang lontarkan itu, ya, sadar, ya, ga usahlah diterus-teruskan budaya kaya gitu, itu memalukan itu, bener ga ya.”
Konteks	Najwa masih melanjutkan pembahasan terkait rumor Prabowo mencekik Wakil Menteri Pertanian Harfik Khasnul Kholbi dalam rapat cabinet. Najwa mempertegas pertanyaannya dengan menanyakan perihal tindakan yang akan Prabowo lakukan dalam menanggapi rumor yang tidak benar itu.

Tuturan yang disampaikan Prabowo pada Data 3 mengandung pelanggaran maksim cara. Hal ini dikarenakan Prabowo memberikan jawaban yang berbelit-belit atau menambahkan informasi yang tidak berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Najwa bertanya dengan bunyi tuturan, *Pak, jadi Pak Prabowo tidak akan menelusuri siapa yang menyebarkan rumor atau kemudian bahkan menempuh jalur hukum terkait itu atau bagaimana, Pak?* Melalui tuturan itu, Najwa tentu berharap bahwa Prabowo akan menjawab terkait tindakan yang akan Prabowo lakukan dalam menanggapi rumor yang tidak benar itu. Namun, Prabowo justru melanggar maksim cara dengan menambahkan informasi terkait pengalamannya dahulu dengan guru-gurunya. Oleh karena itu, tuturan Prabowo, berupa *saya begini, dari dulu saya punya guru-guru yang mengatakan kepada saya, Prabowo, jika kau difitnah, yakan, itu tandanya kau diperhitungkan, dan biasanya fitnah yang semakin kejam itu balik kepada orang yang menyebarkan fitnah* telah melanggar maksim cara. Adapun jawaban yang diperlukan hanya pada bagian yang berbunyi *jadi saya ga pernah urus, saya serahkan pada yang di atas saja. Mudah-mudahan yang lontarkan itu, ya, sadar, ya, ga usahlah diterus-teruskan budaya kaya gitu, itu memalukan itu, bener ga ya.*

Kemudian, maksud dari tuturan tersebut, yakni Prabowo mengungkapkan jika ia tidak ingin menanggapi rumor tersebut secara serius. Hal ini karena Prabowo percaya jika ada yang menyebarkan hal buruk, maka akan kembali pada yang menyebarkan tersebut.

Data 4

Durasi	24.45–25.22
Data	Najwa: “Tetapi apakah itu artinya pendidikan politiknya tidak tepat, justru kalau pendidikan politik, rakyat disampaikan kalo ada yang bagi uang jangan diterima uangnya?” Prabowo: “Oo, sebaiknya jangan diterima, tapi kalo banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, yakan, dia, yang penting dia tidak terpengaruh, jangan dia terpengaruh, itu akan patah, bener ga? Maksudnya itu beri uang, kan untuk membeli, membeli dukungan, membeli kesetiaan, membeli, itu kan sama dengan menyogok, nah, kalo dikasih uang tapi tidak mau diikuti, ya patah, tujuannya.”
Konteks	Sebelumnya Prabowo menjelaskan jika dalam masa kampanye ada yang memberikan uang, maka terima saja uangnya, tetapi nanti ketika pemilihan tetap pilih sesuai hati. Namun, Najwa menganggap pendidikan politik semacam ini tidaklah tepat, sehingga ia mengonfirmasi kembali kepada Prabowo terkait hal ini.

Tuturan yang disampaikan Prabowo pada Data 4 mengandung pelanggaran maksim sama relevansi. Hal ini dikarenakan Prabowo memberikan jawaban tidak relevan atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan pertanyaan dari Najwa.

Najwa bertanya dengan bunyi tuturan, *tetapi apakah itu artinya pendidikan politiknya tidak tepat. Justru kalau pendidikan politik, rakyat disampaikan kalo ada yang bagi uang jangan diterima uangnya?* Melalui tuturan tersebut, Najwa berharap Prabowo akan menjawab terkait pendapatnya tentang tepat atau tidaknya pendidikan politik yang Prabowo paparkan sebelumnya, yaitu meminta rakyat tetap mengambil uang dari oknum politik sebagai bentuk membeli suara saat pemilu, walaupun nantinya tetap memilih sesuai kata hati. Akan tetapi, Prabowo justru melanggar prinsip kerja sama relevansi karena sama sekali tidak ada tuturannya yang menjawab pertanyaan dari Najwa tersebut.

Adapun maksud dari tuturan Prabowo tersebut untuk menanggapi terkait sistem pendidikan politik yang ia tawarkan sebelumnya. Prabowo konsisten bahwa pernyataannya tidaklah salah jika diterapkan saat ini, mengingat realitasnya tidak dapat menghindari politik uang berupa pembagian uang kepada rakyat saat kampanye.

Data 5

Durasi	25.25–25.59
Data	Najwa: “Karna begini pak, yang sempat ramai juga, salah satu ketua umum koalisi Indonesia Maju, itu bagi-bagi uang 50 ribu ke nelayan, Pak.” Prabowo: “Siapa yang Anda maksud?” Najwa: “Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, Pak.” Prabowo: “Iya, tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyaleg, tidak nyabub, dia tidak mau jadi kepala desa pun, jadi dia orang yang suka sedekah.”
Konteks	Najwa dan Prabowo sedang membahas terkait mahalanya biaya politik. Prabowo menjelaskan jika dalam masa kampanye ada yang memberikan uang, maka terima saja uangnya, tetapi nanti ketika pemilihan tetap pilih sesuai hati. Namun, Najwa menganggap cara ini merupakan cara mendidik politik yang keliru. Lalu, Najwa juga mengonfirmasi tanggapan Prabowo terkait adanya ketua umum koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya sempat memberikan uang ke nelayan.

Tuturan yang disampaikan Najwa pada Data 5 mengandung pelanggaran maksimum kuantitas. Hal itu dikarenakan Najwa memberikan jawaban berlebih, di mana dalam satu tuturannya mengandung dua informasi yang sebenarnya kedua informasi tersebut memiliki makna yang sama.

Prabowo bertanya dengan bunyi tuturan, *siapa yang Anda maksud?*. Tuturan Prabowo tersebut semestinya memancing Najwa untuk menjawab nama salah satu dari sepuluh ketua umum koalisi Indonesia Maju tersebut. Namun, Najwa justru melanggar maksimum kuantitas yang dapat dilihat dari jawabannya dengan bunyi *yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, Pak*. Najwa memberikan informasi tambahan yang bahkan ketika tidak disebutkan, Prabowo sudah mengetahui siapa yang dimaksud. Kata tersebut ditandai dengan penambahan kata *ketua umum PAN*. Seharusnya, Najwa tidak perlu menyebutkan frasa tersebut karena sebelumnya ia juga sudah menjelaskan bahwa orang yang dimaksud merupakan ketua umum koalisi Indonesia Maju. Dengan demikian, ketika menyebutkan nama Zulkifli Hasan, artinya sudah merujuk pada salah satu ketua partai.

Data 6

Durasi	28.51–30.23
Data	Najwa: “Pak Prabowo, apakah kalau disambungkan dengan perbincangan kita sebelumnya, biaya politik yang tinggi, apakah itu artinya Bapak relatif aman, karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres tiga kali?” (sorakan penonton) Prabowo: “Mba Nana. Saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih, ya, dan kalo Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya. Tanah aset dinilai,

	ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipake. Aset saya kalo dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash, bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek, karena saya tidak dapet kredit karena saya tidak berkuasa dalam 20 tahun, Mba.” Najwa: “Jadi, Pak...” Prabowo: “Saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK, ya, karena ya ini realita sodara-sodara, ini realita, ya, jadi saya tidak malu-malu, saya...” Najwa: “Pertanyaannya, Pak...” Prabowo: “Saya memang jadi pengusaha, karena saya waktu pensiun, pensiun saya hanya waktu itu, hanya 900 ribu rupiah, sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah, jadi kalo saya tidak berbisnis, saya ga bisa hidup.”
Konteks	Pada acara tersebut, menampilkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) milik Prabowo. Data ini menunjukkan kekayaan Prabowo paling banyak dibandingkan dengan dua data LHKPN calon presiden lainnya. Oleh karena itu, melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait mahalnya biaya politik, maka Najwa menanyakan perihal perasaan Prabowo apakah merasa aman untuk memenuhi kebutuhan politiknya, karena uangnya cukup banyak sesuai yang tertera pada LHKPN tersebut.

Tuturan yang disampaikan Prabowo pada Data 6 ini mengandung pelanggaran maksim relevansi. Hal ini disebabkan karena tuturan Prabowo memberikan informasi yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Najwa.

Sebelumnya, Najwa bertanya dengan bunyi tuturan, *Pak Prabowo, apakah kalo disambungkan dengan perbincangan kita sebelumnya, biaya politik yang tinggi, apakah itu artinya Bapak relatif aman, karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres tiga kali?*. Tuturan Najwa ini, tentu harapannya, akan memancing Prabowo untuk menjawab terkait apakah Prabowo merasa aman dalam menangani biaya politik yang mahal, karena bisa menggunakan uang pribadinya yang cukup banyak. Akan tetapi, Prabowo justru melanggar prinsip kerja sama relevansi karena jawabannya sama sekali tidak relevan dengan pertanyaan yang diberikan.

Adapun maksud dari pelanggaran yang dilakukan Prabowo, yaitu ia ingin mengonfirmasi terkait kekayaannya yang cukup banyak itu dari hasil berbisnis. Hal ini ia lakukan karena sebelumnya Najwa mengatakan bahwa kekayaannya cukup banyak, padahal sudah nyapres 3 kali. Prabowo terlihat cukup khawatir pernyataan Najwa ini mengundang perspektif yang menggiring opini untuk mempertanyakan kejelasan kekayaannya, karena jika mengandalkan gaji tentu tidak akan sebanyak itu (khawatir disangka berkorupsi).

Data 7

Durasi	30.24–32.41
Data	Najwa: “Pak Prabowo saya tidak mempermasalahkan Bapak kaya, bagus jadi orang kaya menurut saya Pak Prabowo. Emm, ee, tapi lebih ke konteksnya tadi pertanyaannya Pak, apakah itu artinya, tidak perlu terlalu bersusah payah mencari modal politik karena sudah ada kekayaan Pak Prabowo bisa makan tabungan atau apa strategi untuk pembiayaan politik kita yang sedemikian mahal seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan?” Prabowo: “Saya kira, e, bukan aman, ya, dalam arti yang saya katakan tadi, apakah umpamanya ya saya punya tanah yang sudah berapa puluh tahun, yakan, tentunya nilainya tambah di atas kertas, kalo saya butuh uang, saya mau jual, siapa mau beli, belum tentu ada yang mau beli, yakan? Tapi saya akui, dalam beberapa keadaan terjepit saya hidupnya dari jual aset, saya hidupnya, kadang-kadang saya, dan ini tidak saya anjurkan kepada semuanya, tapi kadang-kadang saya terpaksa, saya jual aset, saya jual tanah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai saya dan sebagainya.” Najwa: “Terima kasih...” Prabowo: “Tapi sekarang, e, boleh dong gue jawab....” Najwa: “Boleh, Pak” Prabowo: “Enak aja diintrogasi terus. Sekarang, saya dengan gagah berani mengatakan, partai saya, partai saya yang banyak membiayai saya. Kalo saya panggil anggota saya, mereka kadang-kadang bayar sendiri, a, itu, jadi kalo partai yang semangat, partai punya idealis, dia akan bayar sendiri, itu yang ingin saya sampaikan, jadi sekarang self financing sudah berjalan. Contoh, tidak pernah saya kasih, tidak pernah saya kasih uang unuik Gerindra di provinsi, Gerindra di kabupaten, tidak, mereka sendiri, mereka bikin kantor sendiri, mereka bangun kantor sendiri di mana-mana. Kita adalah partai dari bawah, terima kasih Mba Nana.”
Konteks	Najwa merasa jawaban Prabowo terkait perasaannya menanggapi biaya politik yang mahal belum terjawab, sehingga ia mengonfirmasi kembali dengan mengulangi pertanyaan yang sama. Najwa mempertegas pertanyaannya lagi, yaitu apakah dengan uang Probowo yang cukup banyak, sehingga bisa menggunakan uang milik pribadinya sebagai modal politik.

Tuturan yang disampaikan Prabowo dalam Data 7 mengandung pelanggaran maksimum cara. Hal itu dikarenakan Prabowo menyampaikan jawaban yang tidak langsung menjawab pertanyaan Najwa, melainkan memberikan informasi tambahan di luar pertanyaan.

Najwa bertanya dengan bunyi tuturan, *Pak Prabowo saya tidak mempermasalahkan Bapak kaya, bagus jadi orang kaya menurut saya Pak Prabowo. Emm, ee, tapi lebih ke*

*konteksnya tadi pertanyaannya Pak, apakah itu artinya, tidak perlu terlalu bersusah payah mencari modal politik karena sudah ada kekayaan? Pak Prabowo bisa makan tabungan atau apa strategi untuk pembiayaan politik kita yang sedemikian mahal seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan? Melalui tuturan tersebut, Najwa berharap Prabowo akan menjawab terkait strateginya dalam memenuhi biaya politik yang mahal. Najwa kembali ingin memastikan apakah Prabowo akan menggunakan kekayaannya yang cukup banyak itu untuk membiayai politiknya atau tidak. Namun, Prabowo justru melanggar maksim cara dengan menambah informasi dan tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, tuturan Prabowo berupa *saya kira, e, bukan aman, ya, dalam arti yang saya katakan tadi, apakah umpamanya ya saya punya tanah yang sudah berapa puluh tahun, yakan, tentunya nilainya tambah di atas kertas, kalo saya butuh uang, saya mau jual, siapa mau beli, belum tentu ada yang mau beli, yakan? Tapi saya akui, dalam beberapa keadaan terjepit saya hidupnya dari jual aset, saya hidupnya, kadang-kadang saya, dan ini tidak saya anjurkan kepada semuanya, tapi kadang-kadang saya terpaksa, saya jual aset, saya jual tanah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai saya dan sebagainya telah melanggar maksim cara. Adapun jawaban yang diperlukan hanya pada bagian yang berbunyi sekarang, saya dengan gagah berani mengatakan, partai saya, partai saya yang banyak membiayai saya.**

Kemudian, maksud dari tuturan ini Prabowo hendak mempertegas bahwa dirinya akan banyak dibiayai oleh partainya. Prabowo tidak akan menggunakan banyak tabungan pribadinya untuk biaya politik tahun ini.

Data 8

Durasi	45.10–46.16
Data	Najwa: “Pak, satu lagi sebelum saya lempar ke audiens, karena saya ingin minta sikap Bapak soal revisi Undang-Undang ITE, yang saat ini sedang dibahas di DPR, dan memakan banyak korban karena banyak pasal karet di sana. Apa pendapat Anda soal Undang-Undang ITE itu, Pak?” Prabowo: “Saya mau jujur ya, saya, nanti saya akan pelajari lebih dalam, terus terang aja saya tidak mengikuti semua rancangan undang-undang, ya, itu juga di luar bidang saya sebetulnya, ya, saya kan menteri pertahanan saat ini.” Najwa: “Tapi pada prinsip ... (terpotong).” Prabowo: “Saya mengikuti, tapi, intinya, intinya, saya kira yang kita kuatir, adalah bahwa nanti, e, platform-platfom itu dipake untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian dan sering dengan kebohongan, sering dengan hoaks yakan, dan sebagainya, ini rawan, menurut saya ini perlu diperhatikan.”
Konteks	Najwa meminta pendapat atau sikap yang akan dilakukan Prabowo menanggapi perihal UU (Undang-Undang) ITE yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Kabarnya, UU ini bermaalah dan memakan banyak korban karena

	banyak pasal karet. Menanggapi hal ini, Prabowo awalnya menjelaskan bahwa dirinya kurang mengikuti atau mendalami UU ini karena dirasa di luar tupoksinya sebagai menteri pertahanan. Namun, akhirnya ia juga memberikan tanggapannya.
--	--

Tuturan yang disampaikan Prabowo pada Data 8 mengandung pelanggaran maksim cara. Hal ini dikarenakan Prabowo menyampaikan jawaban yang tidak langsung menjawab pertanyaan Najwa. Ia memberikan informasi seakan tidak ingin menjawab pertanyaan Najwa, tetapi pada akhirnya Prabowo merasa terdesak dan menjawab pertanyaan tersebut.

Najwa bertanya dengan bunyi tuturan, *Pak, satu lagi sebelum saya lempar ke audien, karena saya ingin minta sikap Bapak soal revisi Undang-Undang ITE, yang saat ini sedang dibahas di DPR, dan memakan banyak korban karena banyak pasal karet di sana. Apa pendapat Anda soal Undang-Undang ITE itu, Pak?*. Melalui tuturan itu, Najwa tentu berharap jika Prabowo akan menjawab terkait tanggapannya dalam menyikapi UU ITE tersebut. Namun, Prabowo justru melanggar maksim cara dengan menambah informasi bahwa dirinya tidak terlalu mengikuti pembahasan tentang UU-nya karena merasa itu di luar tupoksinya sebagai menteri pertahanan. Dengan demikian, tuturan Prabowo berupa *saya mau jujur ya, saya, nanti saya akan pelajari lebih dalem, terus terang aja saya tidak mengikuti semua rancangan undang-undang, ya, itu juga di luar bidang saya sebetulnya, ya, saya kan menteri pertahanan saat ini* telah melanggar maksim cara. Adapun jawaban yang diperlukan hanya pada bagian yang berbunyi *saya mengikut, tapi, intinya, intinya, saya kira yang kita kuatir, adalah bahwa nanti, e, platform-platform itu dipake untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian dan sering dengan kebohongan, sering dengan hoaks yakan, dan sebagainya, ini rawan, menurut saya ini perlu diperhatikan*.

Kemudian, maksud dari tuturan ini Prabowo tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut, tetapi karena merasa didesak oleh Najwa, akhirnya Prabowo mencoba untuk menjawab walaupun dengan keterbatasan informasi yang ia miliki.

KESIMPULAN

Video YouTube Najwa Shihab berjudul *Prabowo Subianto bicara Gagasan* mengandung 8 pelanggaran prinsip kerja sama. Dari hasil analisis, peneliti menemukan adanya data yang melanggar prinsip kerja sama dengan rincian pelanggaran 4 maksim relevansi, 1 maksim kuantitas, dan 3 maksim cara. Pada sumber data penelitian ini, Prabowo lebih banyak melakukan pelanggaran dibandingkan Najwa. Ia cenderung menjawab pertanyaan Najwa dengan melanggar maksim relevansi. Sering kali terjadi miskomunikasi, sehingga Prabowo tidak fokus menjawab inti dari pertanyaan Najwa, tetapi justru menanggapi hal lain di luar pertanyaan tersebut. Kemudian, Prabowo cenderung melanggar maksim cara, yaitu ia menjawab pertanyaan dari Najwa dengan berbeli-belit dan menambahkan informasi yang tidak diperlukan. Kadang kala, Prabowo langsung menjawab pertanyaan di awal, tetapi terkadang jawabannya berada di tengah ataupun akhir penjelasannya.

Selain itu, dari empat jenis maksim, pada penelitian ini tidak mengandung pelanggaran maksim kualitas, tetapi penelitian ini justru menunjukkan paling banyak pelanggaran relevansi. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa penutur maupun lawan tutur ketika memiliki keterbatasan kemampuan menjawab tidak memilih untuk berkata bohong, akan tetapi cenderung menjawab pertanyaan dengan bertele-tele bahkan mengalihkan topik pembicaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariani, I. A. P. N., Rasna, I. W., & Wisudariani, N. M. R. (2016). IMPLIKATUR PADA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT. Vol. 4 No. 2 (2016).
- Arifin. (2000). Prinsip Prinsip Analisis Wacana. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Arikunto. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Citra, Y. & Fatmawati. (2021). Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam Program Mata Najwa di Trans 7. Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra, 7(2), 437–448. <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i2.1278>
- Efendi, E., Akbar, R. A., Sahlaya, M. R., & Tadjuddin, A. (2023). Komunikasi Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa. Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i1.3232>
- Grice, H. P. (1991). Logic and Conversation. New York: Oxford University Press.
- Intan, R. S. & Suswandi, I. (2022.). Perluasan Makna dan Variasi Kata Anjing pada Generasi Milenia.
- Kesuma, T. M. (2007). Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Carasvatibooks.
- Mailani, O., Nuraeni, I., Syakila, S. A., & Lazuardi, J. (2022). Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia. Kampret Journal, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35335/kampret.v1i1.8>
- Nasution, Z. (2007). Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>
- Rahmawati, N. (2021). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Kesantunan Berbahasa Percakapan dalam Acara “Mata Najwa.” Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia, 4(1), 46. <https://doi.org/10.30998/diskursus.v4i1.9408>
- Setiawan, A., Basuki, R., & Rahayu, N. (2017). PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA PERCAKAPAN DALAM ACARA MATA NAJWA DI METRO TV. Jurnal Ilmiah KORPUS, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33369/jik.v1i1.3121>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryanto. (2015). Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Duta Wacana University.

- Supriyati. (2012). Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi. Bandung: LABKAT.
- Tarigan, D. M. B. (2022). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Acara Catatan Najwa Episode Susahnya Jadi Perempuan. 12(1).
- Umar, H. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Wijana, I. D. P. (2009). Analysis wacana pragmatik kajian teori dan analisis. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Wijaya, H. (2019). PRINSIP KESOPANAN DALAM TINDAK TUTUR TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR MINGGUAN DESA TEBABAN KECAMATAN SURALAGA: KAJIAN PRAGMATIK. MABASAN, 13(1), 77-96.
<https://doi.org/10.26499/mab.v13i1.247>
- Yule, G. (2006). Pragmatik, Terjemahan Indah Fajar dan Rombe Musajab. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.